

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI**

#### **2.1 Sejarah Instansi**

Cikal bakal terbentuknya BRGM tidak lepas dari bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2015 silam. Karhutla ini merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar yang melanda kawasan Asia Tenggara. Bencana bermula pada pertengahan tahun, tepatnya sekitar bulan Juni hingga Oktober 2015, di mana kebakaran meluas di beberapa wilayah, terutama di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Tak lama kemudian, karhutla menjalar di 31 provinsi kecuali DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua adalah provinsi terparah yang mengalami karhutla (Khusnulkatimah, 2020).

Hal itu bisa terjadi sebab pada provinsi-provinsi tersebut merupakan rumah bagi lahan gambut, karena gambut mampu menyimpan cadangan karbon 13 kali lebih besar daripada bobotnya sendiri (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, 2024). Namun, dalang dari bencana ini adalah praktik pembakaran hutan dan lahan secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan besar untuk membuka lahan perkebunan, terutama kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Pembakaran lahan dianggap sebagai metode yang murah dan cepat untuk membersihkan lahan (Kok Bisa, 2018). Terlebih lagi, fenomena El Nino yang melanda menyebabkan musim kemarau berkepanjangan. Faktor manusia dan alam inilah yang menyebabkan karhutla terus terjadi hampir di seluruh Indonesia. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa total karhutla yang terjadi sepanjang 2015 mencapai 2,61 juta hektar, yang mana seluas 869.754 hektar nya terjadi di lahan gambut (Khusnulkatimah, 2020). Lahan gambut yang kering akibat musim kemarau panjang, yang diperburuk oleh fenomena El Niño, menyebabkan api sulit dipadamkan dan menjalar lebih luas.

Kebakaran pada lahan gambut juga menghasilkan asap tebal yang berkontribusi signifikan terhadap krisis kabut asap yang melanda kawasan tersebut. Tentunya bencana ini menyebabkan sejumlah dampak yang menyerang berbagai sektor. Mulai dari sektor lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hubungan politik luar negeri. Karhutla menghancurkan habitat satwa liar,

termasuk spesies yang dilindungi seperti Orangutan Sumatra, Orangutan Kalimantan, dan Harimau Sumatra. Volume asap yang tinggi dari karhutla menimbulkan sejumlah penyakit, seperti asma, iritasi kulit, iritasi mata, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), bahkan menyebabkan 24 orang meninggal (Khusnulkhathimah, 2020). Pada sektor pendidikan pula, asap tebal berkepanjangan membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah terpaksa diliburkan. Selanjutnya, dampak kerugian ekonomi mencapai Rp5,4 triliun dari sektor pariwisata, Rp540 miliar pada sektor pendidikan, serta Rp58,4 triliun pada aspek lingkungan hidup (Khusnulkhathimah, 2020). Tentunya masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam (SDA) untuk mencari nafkah pun terkena dampaknya. Asap tebal ini tidak hanya menyebabkan kerugian di Indonesia, tetapi sampai ke Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Menanggapi bencana ini, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kebakaran dan kabut asap yang semakin meluas. Jokowi bahkan mengunjungi langsung beberapa daerah terdampak di Sumatra dan Kalimantan, serta menegaskan pentingnya penanganan yang cepat dan efektif. Pemerintah pusat mengerahkan ribuan personel gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memadamkan kebakaran. Namun, tantangan besar tetap dihadapi karena lahan gambut yang sulit dipadamkan. Pemerintah juga melibatkan negara-negara tetangga dalam operasi pemadaman, seperti Singapura dan Malaysia, yang turut merasakan dampak kabut asap.

Sebagai langkah strategis untuk mencegah terulangnya bencana serupa, pada 6 Januari 2016, Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG). BRG dibentuk dengan mandat utama untuk melakukan restorasi lahan gambut yang rusak akibat kebakaran, terutama di tujuh provinsi prioritas: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Target utama BRG adalah merestorasi 2 juta hektar lahan gambut yang terbakar dan rusak, dengan tujuan jangka panjang untuk mencegah kebakaran serupa di masa depan dan mengembalikan fungsi ekologis lahan gambut sebagai penyimpan karbon yang vital. Keputusan pembentukan BRG menandai komitmen pemerintah untuk tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga mengatasi akar masalah

yang menyebabkan karhutla, yaitu pengelolaan lahan gambut yang tidak berkelanjutan.

Selang 4 tahun BRG menjalankan tugasnya dalam merestorasi gambut, BRG kembali mendapatkan mandat dari Jokowi untuk merehabilitasi mangrove. Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Kini, tugas BRGM tidak hanya merestorasi ekosistem gambut, tetapi juga merehabilitasi mangrove di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Penambahan mandat ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi krisis lingkungan akibat degradasi hutan mangrove yang mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir dan penurunan kapasitas penyimpanan karbon. BRGM ditargetkan untuk merehabilitasi sekitar 600 ribu hektar mangrove di beberapa provinsi prioritas hingga tahun 2024, memperkuat peran strategis Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah pesisir. Maka dari itu, adapun fungsi BRGM sebagai berikut.

1. Pelaksanaan restorasi gambut.
2. Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan restorasi gambut.
3. Pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan (*rewetting*) gambut dan segala kelengkapannya.
4. Pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka restorasi gambut.
5. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut.
6. Pelaksanaan perbaikan penghidupan masyarakat di lahan gambut.
7. Pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.
8. Pemberian dukungan administrasi.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.



**Gambar 2.1 Logo BRGM**  
Sumber: *brgm.go.id*

Setiap warna dari logo BRGM memiliki makna dan merepresentasikan terkait segala hal yang berkaitan dengan gambut dan mangrove. Berikut penjelasannya:

1. Latar belakang warna hijau muda melambangkan kesejahteraan dan kehidupan bagi masyarakat yang berada dalam ekosistem gambut dan mangrove.
2. Bidang melengkung warna hijau melambangkan tutupan vegetasi di atas ekosistem gambut yang mencerminkan daya dukung, produktivitas dan peranan ekosistem gambut dalam sistem penyangga kehidupan.
3. Bidang warna hijau berjumlah 9 membentuk daun melambangkan 9 provinsi prioritas percepatan rehabilitasi mangrove.
4. Bidang warna coklat berjumlah 7 melambangkan 7 provinsi sebagai provinsi prioritas restorasi gambut.
5. Bidang berwarna biru melambangkan laut sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6. Tulisan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melambangkan BRGM memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, serta bekerja sama dengan *stakeholder* lainnya untuk mewujudkan perbaikan penghidupan masyarakat.

Selama 8 tahun beroperasi, BRGM telah memperoleh segudang prestasi dan penghargaan. Adapun penghargaan yang diterima oleh BRGM adalah sebagai berikut.

1. BRGM sebagai Badan Publik Informatif pada kategori Lembaga Non-Struktural dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

2. BRGM meraih predikat sebagai Mitra Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Terbaik oleh IPB University dalam acara Malam Penghargaan IPB University 2022.
3. BRGM meraih Bhumandala Ariti (Medali Perunggu) dalam penghargaan Bhumandala Award 2022, yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).
4. BRGM meraih penghargaan sebagai Mitra dengan Inovasi Bidang Restorasi Gambut untuk Mendukung Ekonomi Biru Indonesia (Smart Sylvodishery), pada acara Anugerah Diktiristek 2022 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek.
5. BRGM sebagai Badan Publik Informatif pada kategori Lembaga Non-Struktural dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.
6. BRGM meraih Bhumandala Kanaka (Medali Emas) dalam penghargaan Bhumandala Award 2023, yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).
7. BRGM meraih Bhumandala Rajata (Medali Perak) dalam penghargaan Bhumandala Award 2024, yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).
8. BRGM memperoleh piagam penghargaan sebagai Juara 2 *Booth* Terbaik pada Acara Pekan Keanekaragaman Hayati, yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 15 – 17 Mei 2024.

#### **2.1.1 Visi BRGM**

BRGM memiliki visi yakni terwujudnya kondisi ekosistem gambut dan mangrove yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

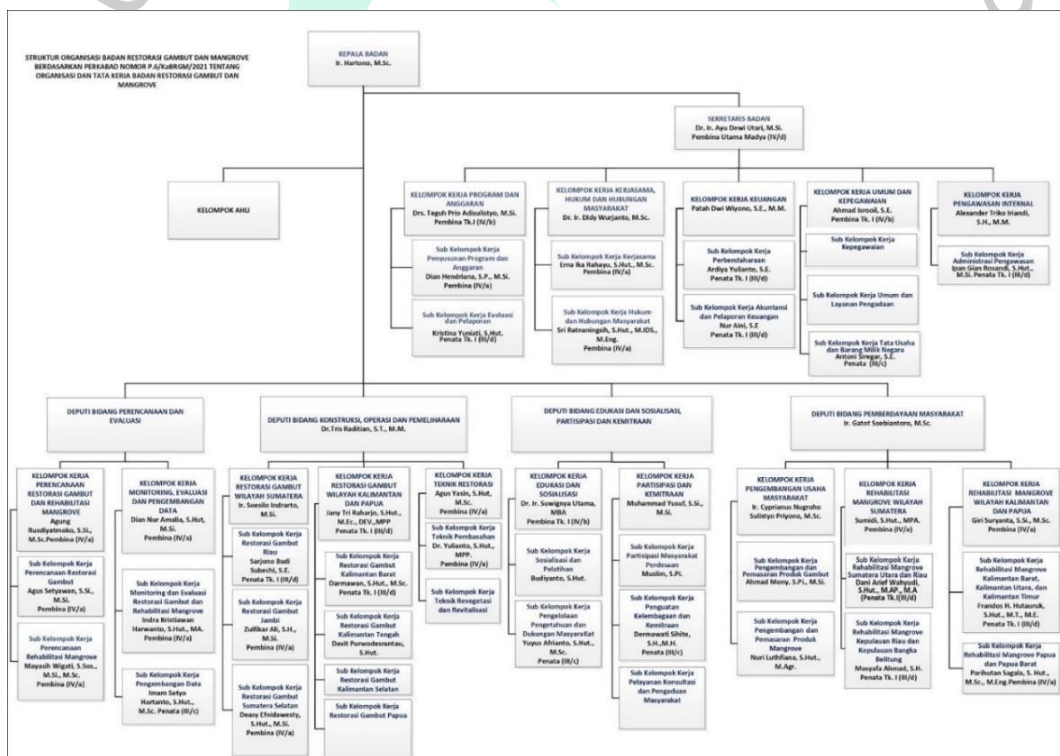
### 2.1.2 Misi BRGM

Adapun misi BRGM adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan mengembangkan pemanfaatan gambut dan mangrove yang berkelanjutan.
2. Memfasilitasi pemulihan gambut dan mangrove yang terdegradasi.
3. Menggalang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove.
4. Memfasilitasi aksi riset untuk mendukung pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.

## 2.2 Struktur Organisasi

### 2.2.1 Struktur Organisasi BRGM



Gambar 2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja BRGM

Sumber: Dok. Internal BRGM

Gambar 2.2 menunjukkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di BRGM. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan (Perkabdad) Nomor P.6/KaBRGM/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRGM. BRGM dipimpin oleh seorang Kepala. BRGM sendiri terdiri dari Sekretaris Badan yang



membawahi lima Kelompok Kerja (Pokja). Selain itu, Kepala BRGM membawahi empat Deputi, yang mana setiap Deputi juga memiliki Pokjanya masing-masing. Deputi 1 adalah Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi. Deputi 2 adalah Deputi 2 adalah Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan. Selanjutnya. Deputi 3 adalah Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan. Terakhir, Deputi 4 adalah Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Namun pada kali ini, praktikan hanya berfokus pada struktur yang berkaitan langsung dengan praktikan, mulai dari Kepala, Sekretaris, dan Pokja di bawah Sekretaris. Adapun deskripsi setiap jabatan pada struktur akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Kepala

Kepala BRGM merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur organisasi BRGM yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah memimpin dan mengawasi pelaksanaan program restorasi gambut serta rehabilitasi mangrove yang diamanatkan oleh pemerintah. Kepala Badan ini juga bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan strategis dan mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai inisiatif yang berkaitan dengan perlindungan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia. Sebagai pemimpin, Kepala BRGM berperan penting dalam menentukan arah kebijakan lembaga, memastikan keberlanjutan program, dan menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun internasional.

2. Sekretaris

Sekretaris BRGM merupakan jabatan yang bertugas untuk mendukung operasional lembaga dengan memastikan kelancaran administrasi, keuangan, dan kepegawaian. Sekretaris Badan bertanggung jawab atas koordinasi antar Deputi dan Pokja, serta mengelola informasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan kegiatan lembaga. Selain itu, Sekretaris juga bertanggung jawab dalam menjaga hubungan baik antara BRGM dengan pihak eksternal melalui komunikasi yang efektif, baik dalam hal publikasi program maupun penyampaian kebijakan. Sekretaris bekerja langsung di bawah Kepala Badan dan memiliki peran krusial dalam memastikan setiap unit dalam BRGM berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Secara struktur, Sekretaris membawahi Pokja-pokja berikut.

a. Pokja Program dan Anggaran

Pokja ini bertanggung jawab atas perencanaan, penyusunan, dan pengelolaan anggaran di BRGM. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap program yang dirancang memiliki alokasi anggaran yang sesuai serta diimplementasikan secara efisien. Pokja ini juga bertugas dalam evaluasi penggunaan anggaran untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan lembaga. Pokja ini memiliki dua Subpokja:

1) Subpokja Penyusunan Program dan Anggaran

Bertugas menyusun rencana anggaran untuk mendukung program restorasi gambut dan mangrove serta memastikan program-program tersebut dibiayai dengan benar.

2) Subpokja Evaluasi Anggaran

Bertugas memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam implementasi program.

b. Pokja Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Pokja Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat (KHH) memiliki peran yang sangat penting dalam membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta memastikan setiap program BRGM sesuai dengan regulasi hukum. Selain itu, KHH bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi dengan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove.

c. Pokja Keuangan

Pokja Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan BRGM, memastikan setiap transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta memantau arus kas untuk mendukung kelancaran operasional lembaga. Pokja ini terdiri dari 2 Subpokja, yakni:

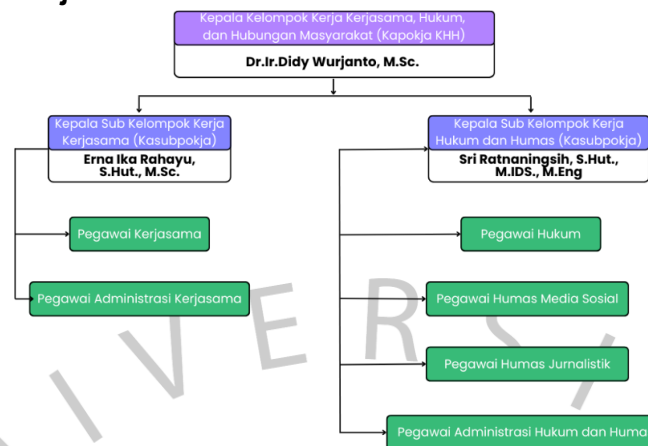
1) Subpokja Perbendaharaan

Mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan BRGM dan memastikan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan pemerintah.



- 2) Subpokja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  
Menyusun laporan keuangan dan memastikan pencatatan akuntansi dilakukan secara transparan dan akurat.
- d. Pokja Umum dan Kepegawaian
- Pokja ini bertugas mengelola sumber daya manusia serta administrasi umum di BRGM, termasuk proses rekrutmen, pengembangan kapasitas pegawai, dan pengelolaan fasilitas pendukung lainnya. Terdapat 2 Subpokja pada Pokja ini, yakni:
- 1) Subpokja Kepegawaian  
Bertugas mengelola segala hal terkait pegawai BRGM, termasuk pengelolaan data kepegawaian, kenaikan jabatan, serta pengembangan kompetensi pegawai.
  - 2) Subpokja Umum dan Layanan Pengadaan  
Bertugas mengelola kebutuhan logistik, pengadaan barang dan jasa, serta fasilitas umum yang mendukung operasional BRGM.
- e. Pokja Pengawasan Internal
- Pokja ini berfungsi sebagai auditor internal yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua kegiatan BRGM berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pokja ini juga melakukan audit terhadap penggunaan anggaran dan implementasi program. Pengawasan Internal hanya memiliki 1 Subpokja, yakni Administrasi Pengawasan Internal, yang bertugas mengelola aspek administratif dari pengawasan internal, termasuk pelaporan dan dokumentasi hasil pengawasan.

## 2.2.2 Struktur Pokja KHH BRGM



**Gambar 2.3 Struktur Pokja KHH BRGM**

Sumber: Dok. Internal BRGM

Pada pelaksanaan KP ini, praktikan mendapatkan *title* sebagai Magang Humas. Maka dari itu, praktikan ditempatkan di Pokja KHH. Jumlah seluruh pegawai KHH adalah 19 orang, dengan 1 Kapokja, 2 Kasubpokja, dan 16 pegawai. KHH sendiri dikepalai oleh Dr. Ir. Didy Wurjanto, M.Sc., sebagai Kapokja KHH. Seperti pada gambar 2.3, KHH terdiri dari 2 Subpokja, yakni:

### 1. Subpokja Kerjasama

Bertugas membangun dan mengelola kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga internasional, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Kerjasama dikepalai oleh Erna Ika Rahayu, S.Hut., M.Sc., sebagai Kasubpokja Kerjasama. Adapun jumlah pegawai Kerjasama berjumlah 5 orang, 1 diantaranya merupakan yang bertanggung jawab atas administrasi Kerjasama. Administrasi meliputi kegiatan pengurusan surat-menyurat dan keuangan Kerjasama. Sedangkan 4 pegawai lainnya yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis untuk berkolaborasi. Adapun contohnya seperti mengikuti kegiatan pertemuan dengan kedutaan, mengisi materi pada seminar dan webinar, dan penandatanganan kerja sama atau penandatanganan penerimaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan profit.

### 2. Subpokja Hukum dan Humas

Bertugas mengkaji aspek legal dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan BRGM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagian Humas bertugas mengelola komunikasi publik dan

bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi terkait program-program BRGM melalui berbagai media agar dapat dipahami oleh masyarakat luas. Sri Ratnaningsih, S.Hut., M.IDS., M.Eng., selaku Kasubpokja Hukum dan Humas. Adapun pegawai Hukum sendiri berjumlah 2 orang, yang tugasnya melakukan penyusunan draf UU, aturan, serta pemantauan kegiatan restorasi gambut dan mangrove sesuai dengan hukum negara dan norma di masyarakat sekitar.

Sementara Humas di BRGM terbagi atas dua, yakni media sosial dan jurnalistik. Media sosial berfokus pada pengelolaan media sosial, produksi konten, serta menjawab pertanyaan yang masuk. Pegawai Media Sosial berjumlah 4 orang. Tidak ada *title* khusus dalam Humas BRGM. Namun, terdapat peran Social Media Specialist, Graphic Designer, Video Editor, dan IT Technician yang dilakukan Humas BRGM dalam hal media sosial. Jurnalistik sendiri fokusnya untuk membangun dan memelihara *media relations*, penulisan artikel dan siaran pers, media monitoring, dan *contact person* BRGM. Jumlah pegawai Jurnalistik adalah 2 orang, dengan perannya sebagai Photographer dan Videographer, serta Journalist. Kemudian, sama seperti Kerjasama, administrasi Hukum dan Humas juga bertanggung jawab atas surat-menyurat, keuangan, serta menjadi koordinator lapangan dan asisten Kapokja ketika ada acara dan perjamuan. Jumlah pegawainya adalah 3 orang.

### **2.3 Kegiatan Umum Perusahaan**

BRGM adalah lembaga non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BRGM bertugas memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal restorasi gambut, serta melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di provinsi target. BRGM memiliki target pelaksanaan restorasi gambut seluas 1,2 juta hektar. Sedangkan target pelaksanaan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektar. BRGM memiliki kantor utama di Jl. Teuku Umar No.17 1, RT.1/RW.1, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kantor lainnya berlokasi di Jl. Cikini Raya No.42, RT.16/RW.2,

Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun tugas BRGM sebagai berikut.

1. Memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada area kerja restorasi gambut. Wilayah kerja BRGM pada restorasi gambut meliputi 7 provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.
2. Melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove pada area kerja. Wilayah kerja BRGM pada rehabilitasi mangrove meliputi 9 provinsi, yakni Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.

Fokus wilayah kerja ini ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan ekosistem dan kebutuhan intervensi untuk memperbaiki kondisi lingkungan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan cakupan wilayah kerja yang luas, BRGM mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, komunitas lokal, dan mitra internasional. Mitra kerja BRGM dalam restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove yang sama-sama instansi pemerintah juga adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan World Bank. Sedangkan mitra kerja BRGM pada instansi lain cukup beragam, mulai dari perusahaan korporasi, *non-government organization*, komunitas, serta kelompok masyarakat.